

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENGELOLAAN
DAN PENINGKATAN POTENSI WISATA DALAM MENUNJANG
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG DI KECAMATAN
LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI
UTARA**

Firely Ganap
NPP. 30.1277

*Asdaf Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi
Utara Prodi Kebijakan Publik
Email : firelyganap15@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): the success of managing village funds and prioritizing the use of village funds for Village SDGs is largely determined by the support and participation of all parties, especially village fund management institutions starting from the District, District, and Village level Management Teams. **Purpose:** The aim of this research is to find out how the Village Fund Allocation Policy is implemented in managing and increasing tourism potential in supporting the development of the Likupang Special Economic Zone in East Likupang District, North Minahasa Regency, North Sulawesi Province. **Method:** This study uses a qualitative method. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observations and documentation. Results/Findings: In general, the implementation of village fund allocation policies in managing and increasing tourism potential in supporting the development of the Likupang special economic zone in Likupang Timur sub-district, North Minahasa district, North Sulawesi province has been going well, as measured by the Grindle 1980 Implementation theory. **Conclusion:** In general, implementation The policy of allocating village funds in managing and increasing tourism potential in supporting the development of special economic zones in East Likupang sub-district, North Minahasa regency, North Sulawesi province has been going well, but there are still some deficiencies in the management of village funds that are not in accordance with village fund allocation guidelines. **Keywords:** Implementation, management, village funds.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): keberhasilan pengelolaan dana desa dan pengutamakan penggunaan dana desa untuk SDGs Desa sangat ditentukan oleh dukungan dan partisipasi semua pihak, khususnya lembaga pengelola dana desa mulai dari Tim Pengelola tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta Desa. **Tujuan:** Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Wisata Dalam Menunjang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data pada Penelitian ini dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Secara umum implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus likupang di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara sudah berjalan baik, diukur melalui teori Implementasi Grindle 1980. **Kesimpulan:** Secara umum implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara sudah berjalan baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan masih adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan pedoman pengalokasian dana desa. **Kata Kunci :** Impelentasi, pengelolaan, dana desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta pengentasan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. keberhasilan pengelolaan dana desa dan pengutamakan penggunaan dana desa untuk SDGs Desa sangat ditentukan oleh dukungan dan partisipasi semua pihak, khususnya lembaga pengelola dana desa mulai dari Tim Pengelola tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta Desa.

APBDesa merupakan bukti kewenangan pemerintah desa dalam mendanai sepeda pemerintah, dan APBDesa tahun anggaran berikutnya harus disusun dalam bentuk APBDesa untuk tahun berjalan. APBDesa mencantumkan semua pendapatan serta pengeluaran sehari-hari dan perkembangan yang mencerminkan rencana kegiatan yang dilakukan bersama oleh peralatan dan masyarakat desa..

Untuk mencapai tujuan penyediaan dana desa tersebut di atas, dana desa akan digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Tahun 2018 tentang Pembangunan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Keputusan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas pengelolaan dana desa tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa secara ideal mengutamakan dan menyeimbangkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam praktiknya pemberdayaan masyarakat terabaikan, padahal hal ini tidak demikian halnya di lapangan dimana pembangunan infrastruktur menjadi prioritas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Likupang Timur merupakan titik fokus

permasalahan yang akan menghambat proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Likupang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana di desa Kecamatan Likupang Timur. Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di Kecamatan Likupang Timur, pembangunan infrastruktur masih belum optimal seperti bangunan BUMDes yang terbengkalai, serta infrastruktur lainnya seperti jalan dan properti pemerintah desa lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Likupang Timur dalam hal ini Desa Likupang satu mengelola dana desa yang khusus dialokasikan untuk pengelolaan dan perbaikan desa dan “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Wisata Dalam Menunjang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Kesenjangan Masalah

Saat ini masyarakat desa di Kecamatan Likupang Timur masih belum mengetahui adanya program-program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memberikan dukungan otonomi karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Disisi lain pemerintah desa di Kecamatan Likupang Timur belum memiliki program yang dapat memenuhi kebutuhan umum masyarakat berupa pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak menjalankan program pemerintah, dan alokasi dana desa sesuai dengan yang seharusnya dipimpin pemerintah atau yang dibutuhkan masyarakat. Diharapkan Pemerintah Desa dapat memanfaatkan ADD ini dengan melaksanakan program pembangunan desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, apalagi saat ini Kabupaten Likupang Timur telah masuk dalam daftar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang akan berdampak signifikan terhadap peningkatan potensi wisata di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penyelesaian masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ni' Ma Rahmadani (2022) yang berjudul Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan dari Pemerintah Desa Towara Pantai dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Oktaviani Pratiwi (2021) yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bontoala. Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Andini Winarianti (2020) yang berjudul Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa, Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gowa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian yang mana fokus penelitian penulis adalah bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus likupang di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara. Selanjutnya penulis ingin melihat apakah alokasi dana desa memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Desain Kualitatif Deskriptif. Selanjutnya pada analisis implementasi kebijakan penulis memilih untuk menggunakan teori Implementasi milik Grindle 1980. Kemudian dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara sudah berjalan efektif tetapi ada beberapa kekurangan diantaranya, masih adanya program yang tidak efektif dalam penggunaan dana desa sehingga dapat menghambat kemajuan dalam mendukung program KEK Pariwisata.

Informan pada penelitian ini terdiri dari Camat Kecamatan Likupang Timur, Kepala Desa dan Peirangkat Desa Likupang Satu, serta Masyarakat Desa Likupang Satu. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data melalui Teknik Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara.

Penelitian ini di buat menggunakan teori Implementasi milik Grindle (1980) yang terbagi dalam tiga dimensi yaitu isi kebijakan, konteks kebijakan, dan hasil kebijakan. dijelaskan sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

a. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Desa

Pemanfaatan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan keadaan lingkungan alam Desa Likupang Satu yang dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata alam. Tempat wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Selain sumber daya alam, penerapan Dana Desa untuk pembangunan Desa Likupang Satu meimaksimalkan sumber daya manusia.

2. Konteks Kebijakan

a. Menjalin Kerjasama Yang Baik Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penerapan Program Alokasi Dana Desa

Pemerintah Desa khususnya di Likupang Satu sejauh ini masih menjalankan tugas

pokoknya masing-masing dengan baik, hal ini dilihat dari kinerja dan keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan pemberdayaan berupa penyaluran bantuan bagi lansia di Likupang Satu. respon dari pelaksana program dana desa terhadap keberadaan dana desa di Desa Likupang Satu cukup positif, mulai dari Pemerintah desa hingga masyarakat desa. Pemerintah desa dan masyarakat bahu-membahu secara aktif melaksanakan prakarsa dana desa untuk pembangunan Desa.

3. Hasil Kebijakan

a. Dampak Dari Alokasi Dana Desa

Program alokasi dana desa yang telah dirancang dan dijalankan diproyeksikan dapat memberikan manfaat positif bagi pengguna program. Tujuan utama Program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui peimbangan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Likupang Satu yang sudah ada masterplannya seperti pembangunan saluran air, perbaikan jalan ekonomi, dan pembangunan bangunan BumDes, sampai pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, merupakan salah satu perubahan yang dirasakan.

3.2 Faktor - Faktor Penghambat Dalam Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dari segi manajemen, faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Peneliti melakukan studi lapangan dengan membahas dan memetakan kesulitan-kesulitan pelaksanaan pembagian uang daerah. Berikut hambatan Kebijakan Alokasi Dana Desa:

1. Masih adanya pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan pedoman pengalokasian dana Desa
2. Masih adanya program yang tidak efektif dalam penggunaan dana desa.

3.3 Upaya Mengatasi Penghambat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan terkait upaya dalam mengatasi faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin harus memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
2. Penyusunan program Desa yang mendukung KEK Pariwisata harus lebih jelas dan mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam tahap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut hal tersebut, tujuan dana desa di Likupang Satu adalah mengajak masyarakat desa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan semangat kemasyarakatan, dan mengawasi penggunaan dana Desa karena pengaruh lokal. Karena maksud dan tujuan Desa Likupang Satu terkait dengan tujuan pemerintah, masyarakat juga berperan aktif dalam upaya pembangunan infrastruktur untuk memajukan masyarakat desa. Ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung pengelolaan dana desa agar bisa digunakan dengan baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka ada beberapa penemuan utama penelitian yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, implementasi kebijakan alokasi dana desa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi desa likupang satu. Kedua, melalui kerjasama masyarakat antara masyarakat dan pemerintah dalam program-program alokasi dana desa seperti pembangunan pembangunan jalan desa dapat membantu memberikan kenyamanan dan mendukung aktifitas masyarakat desa sehari-hari. Permasalahan yang ada dalam pengalokasian dana desa ini adalah Masih adanya pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan pedoman pengalokasian dana Desa.

IV. KESIMPULAN

Secara umum implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur sudah berjalan baik, diukur melalui Teori Grindle 1980. Indikator tersebut dapat dilihat dengan Spesifikasi tercapai pada Indikator isi kebijakan yaitu meningkatnya kualitas ekonomi desa melalui Pemanfaatan dana desa yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan keadaan lingkungan alam Desa Likupang Satu yang dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata alam. Tempat wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Selain sumber daya alam, penerapan Dana Desa untuk pembangunan Desa Likupang Satu meimaksimalkan sumber daya manusia. Dari sisi konteks kebijakan Kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dalam memaksimalkan alokasi dana desa pada program pembangunan berjalan baik Pemerintah desa dan masyarakat bahu-membahu secara aktif melaksanakan prakarsa dana desa untuk pembangunan Desa. Dari segi hasil kebijakan sudah memberikan dampak positif Peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Likupang Satu yang sudah ada masterplannya seperti pembangunan saluran air, perbaikan jalan ekonomi, dan pembangunan bangunan BumDes, sampai pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, merupakan salah satu perubahan yang dirasakan..

Keterbatasan Penelitian. keterbatasan utama Penelitian ini yakni waktu dan jarak daritempat tinggal penulis ke lokasi penelitian. Namun dengan waktu yang terbatas dan jarak yang jauh dari lokasi penelitian penulis masih dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal dan mampu dalam mengumpulkan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan Penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk menyempurnakan penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini sehingga mencapai dan menghasilkan penelitian yang akurat dan bermanfaat untuk pemerintah daerah khususnya Desa Likupang Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemerintah Desa Likupang Satu Kecamatan Likupang Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

Ni'Ma Rahmadani. 2022. *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara*

Oktaviani Pratiwi. 2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*

Andini Winarianti. 2020. *Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa*

Peraturan Menteri Desa Tahun 2018 tentang Pembangunan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Keputusan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas pengelolaan dana desa tahun 2019.

